

Nasdem Sebut Victor Laiskodat Tolak Tawaran Jadi Menteri

JAKARTA (IM) - Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan, kader Nasdem yang juga Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Victor Laiskodat ditawari jadi Menteri di Kabinet Kerja II. Namun, kata Willy, Victor menolak tawaran tersebut.

Menurut Willy, Victor ingin fokus sebagai Gubernur NTT. Victor pun, ujar Willy, masih diinginkan oleh masyarakat NTT sebagai pemimpin mereka. "Banyak aspirasi rakyat dan tokoh-tokoh masyarakat dan agama NTT meminta ke presiden untuk kakak Victor tetap memimpin NTT. Karena masif permintaan untuk beliau (Victor Laiskodat) terus memimpin NTT," kata Willy kepada wartawan, Senin (20/10).

Meski telah memastikan Victor mundur dari bursa menteri, Willy melanjutkan, Nasdem belum menentukan nama pengganti. Menurut Willy, nama calon menteri dari Nasdem sampai saat ini masih di tangan presiden. "Kita tunggu aja siapa yang akan dipanggil presiden bentar lagi," ujarnya.

Sebelumnya, nama Victor memang santer disebut sebagai calon menteri Jokowi. Bahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, Victor siap jika ditempatkan sebagai Menteri Kehutanan dan Lingkung-

an Hidup (LHK). Menurut Johnny, Victor telah memahami situasi politik ibu kota.

Partai NasDem juga memastikan akan tetap berada di koalisi Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Meski sempat dingin atas wacana partai oposisi bergabung ke koalisi, NasDem kini tak mempermasalahkannya. "Tentu tetap di koalisi. Masa meninggalkan apa yang sudah diperjuangkan?" tegas Ketua DPP NasDem Irma Suryani Chaniago kepada wartawan, Senin (21/10).

NasDem sempat meminta agar partai-partai eks rival Jokowi-Ma'ruf tetap menjadi oposisi. Namun kini Gerindra dipastikan akan masuk koalisi.

Saat dikonfirmasi apakah siap bekerja sama dengan Gerindra di kabinet, Irma memastikan tak ada masalah. "Kenapa tidak?" ucapnya singkat.

Meski begitu, NasDem tetap menyindir soal oposisi yang masuk koalisi. NasDem pun mengaku siap bila memang partainya yang bertukar peran sebagai 'oposisi'. "Kalau semua parpol masuk ke koalisi pemerintah, lalu siapa yang jadi checks and balances dan penyanggah aspirasi rakyat? Dan kalau itu terjadi, tentu NasDem siap mengorbankan diri untuk berada di sisi rakyat. Siap menjadi penyampai aspirasi rakyat yang pasti," kata Irma. • pan

Sidang Praperadilan Imam Nahravi Ditunda

JAKARTA (IM) - Sidang praperadilan yang diajukan Mantan Menpora Imam Nahravi terkait kasus dugaan suap dana hibah KONI ditunda. Penundaan dilakukan karena pihak KPK tidak menghadiri persidangan.

Hakim tunggal Elfian mengatakan surat panggilan sidang sudah diterima KPK tertanggal 15 Oktober lalu. Namun hingga (Senin) siang hari pukul 13.30 WIB KPK tidak kunjung hadir sehingga hakim memutuskan menunda sidang selama 2 pekan. "Persidangan ini Insyaallah kita buka kembali Senin 4 November," kata Elfian, di PN Jaksel, Jl Ampera Raya, Jakarta Selatan, Senin (21/10).

Persidangan ini sedianya digelar dengan agenda pembacaan permohonan praperadilan dari pihak Imam Nahravi. Pada persidangan pihak pengacara Imam Nahravi sempat meminta hakim agar tidak menunda sidang selama 2 minggu.

Sebab, mereka khawatir pokok perkara Imam Nahravi akan segera rampung dan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Akan tetapi, hakim memutuskan tetap menunda sidang selama 2 minggu karena bentrok dengan kegiatan pribadinya bila sidang hanya ditunda 1 minggu.

"Klien kami ini kan berburu waktu. Belum masuk pokok perkara. Kami punya peran penting bagaimana hak klien kami diungkap di praperadilan. Kita juga kejar

kejaran dari KPK ntar masuk ke pokok perkara," kata salah satu tim pengacara Imam.

Sementara itu, Kuasa hukum Imam Nahravi, Saleh mengatakan permohonan praperadilan itu diajukan karena keberatan atas status tersangka, penyidikan hingga penahanan yang ditetapkan pada kliennya. Ia mempertanyakan apakah penetapan tersangka itu sudah sesuai bukti permulaan yang cukup atau tidak.

Saleh juga menyinggung terkait prestasi Imam Nahravi saat menjabat sebagai Menpora. Ia menuturkan, di bawah kepemimpinan Imam Nahravi, prestasi atlet Indonesia di kancah internasional semakin meningkat.

"Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahravi ini adalah menteri yang bisa dibanggakan. Kenapa bisa dibanggakan? Karena coba kamu krosek prestasi dari Pak Menpora ini bagaimana kemudian Asian Games dari sebelumnya 4 emas di tahun 2014 kemudian di tahun 2018 berapa emas? 31 emas. Yang kedua untuk Asian para games 37 di bawah naungan atau di bawah Menpora Imam Nahravi yang sebelumnya ada berapa sebelumnya 2014 ada 9 emas. Nah ini adalah prestasi yang sangat luar biasa makanya kita terus terang kejut kemudian Mas Imam Nahravi tahu itu ditetapkan menjadi tersangka, poinnya salah satu itu," kata Saleh. • han

Hari Santri, Khofifah Ajak Masyarakat Mengheningkan Cipta Serentak 60 Detik

SURABAYA (IM) - Memperingati Hari Santri yang jatuh pada 22 Oktober, Gubernur Khofifah Inder Parawansa membuat surat edaran. Surat ini mengajak seluruh masyarakat Jatim melaksanakan doa bersama dan mengheningkan cipta selama 60 detik.

Mengheningkan cipta ini dilakukan mulai pukul 08.00 WIB. Ajakan mengheningkan cipta untuk mengirimin doa pada para syuhada' dan pahlawan yang telah gugur berjuang dalam merebut kemerdekaan Republik Indonesia.

"Kita ingin Hari Santri tidak diperingati oleh para santri saja, tapi juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama berdoa untuk para syuhada' yang ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia," kata Khofifah di Surabaya, Senin (21/10).

Sesuai Kepres Nomor 22 Tahun 2015, Hari Santri telah ditetapkan tanggal 22 Oktober.

Ajakan mengheningkan cipta ini dikeluarkan dalam Surat Edaran Nomor: 003.3/78/033/2019 tentang Hari Santri di Provinsi Jawa Timur yang diterbitkan pada 18 Oktober 2019.

Dalam surat tersebut,

dicantumkan jika doa bersama di pesantren dilaksanakan pukul 20.30 WIB. Hal ini bertepatan dengan diumukannya fatwa resolusi jihad oleh KH Hasyim Asy'ary yang menyerukan untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan fardhu ain atau wajib.

Mengheningkan cipta, lanjut Khofifah dilakukan serentak di sekolah, kantor-kantor pemerintahan, kantor swasta, pasar dan seluruh tempat yang ada di Jawa Timur. Termasuk pondok pesantren dan juga tempat pendidikan di Jatim.

Khofifah menyebut surat edaran ini disebarkan ke jajaran forkopimda provinsi Jawa Timur, bupati wali kota se-Jawa Timur, kepala OPD Provinsi Jawa Timur, kepala kanwil, dirut BUMN atau BUMD, pimpinan perusahaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi masyarakat, dan segenap masyarakat Jatim.

"Semoga seluruh masyarakat Jawa Timur bisa memaknai Hari Santri ini sebagai momen untuk memperkuat jiwa juang dan kepahlawanan disertai doa untuk syuhada, pahlawan dan keselamatan bangsa," harap Khofifah. • osm

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



PRABOWO DATANG KE ISTANA KEPRESIDENAN

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) didampingi Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo mengangkat ibu jari sesuai bertemu Presiden Joko Widodo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/10). Prabowo mengaku siap membantu di dalam pemerintahan pada periode tahun 2019-2024.

Mahfud MD: Presiden Jokowi Tahu yang Cocok untuk Saya

"Tidak disebutkan menteri apa, kan masih banyak kalau dari cerita-cerita saya dengan Bapak Presiden bisa di bidang hukum, bisa di politik, bisa di agama juga seperti yang selama ini diisukan kan banyak disebut Menkum HAM, Jaksa Agung, katanya Menag, katanya apa lagi pokoknya di bidang itu," ujar Mahfud MD.

JAKARTA (IM) - Mahfud MD dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang pengumuman kabinet baru. Mahfud mengaku diskusi soal penegakan hukum, pelanggaran HAM hingga deradikalisasi.

"Ada lagi soal pelanggaran HAM kita diskusi banyak, soal pemberantasan korupsi di ber-

bagai sektor, ternyata Bapak Presiden mempunyai data yang sangat detail dan terukur tentang apa-apa yang menjadi masalah," kata Mahfud.

Pernyataan itu disampaikan Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10). Mahfud ingin bangsa ini bersatu dalam keberagaman.

"Ada juga persoalan deradikalisasi yang sekarang ini pembebanan-pembebanan sifatnya primordial, yang sebenarnya tidak perlu terjadi karena substansi sebenarnya tidak ada perbedaan yang tajam supaya dipersatukan kembali dalam konsep kebersatuan di dalam keberagaman, atau keberagaman di dalam kebersatuan," ujar dia.

Namun Mahfud tidak diberitahu mengenai posisi apa yang akan dijabatnya pada periode kedua pemerintahan Jokowi. Ada sejumlah posisi yang disebut Mahfud yakni Menkum HAM, Jaksa Agung dan Menag.

"Tidak disebutkan menteri apa, kan masih banyak kalau dari cerita-cerita saya dengan Bapak Presiden bisa di bidang hukum bisa di politik bisa di

agama juga seperti yang selama ini diisukan kan banyak disebut Menkum HAM, Jaksa Agung, katanya Menag, katanya apa lagi pokoknya di bidang itu," ujar dia.

Mahfud juga mengaku kaget Jokowi mengetahui betul latar belakang dia. Mahfud yakin Jokowi menempatkan dirinya di posisi yang tepat. "Saya kira, saya surprise juga, presiden tahu betul latar belakang saya dari waktu ke waktu sehingga saya tidak perlu nawar, beliau sudah tahu yang cocok untuk saya apa, gitu. Sehingga saya juga tidak perlu bertanya, beliau sudah

tahu saya tempatnya di mana," ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga mengatakan Jokowi memperhatikan survei soal penegakan hukum dengan baik. "Bapak Presiden memperhatikan survei-survei yang tadi hasil survei di bidang penegakan hukum yang pada tahun terakhir ini agak turun sehingga kita diminta bekerja keras untuk benar-benar berusaha menegakkan hukum sebaik-baiknya," ucap Mahfud. • dot

KontraS Harap Anggota Kabinet Bebas dari Pelanggaran HAM

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil sejumlah calon menteri untuk kabinet di periode kedua. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyarankan calon menteri Jokowi harus bersih dari pelanggaran HAM.

"Kita berharap kabinet di periode kedua Jokowi ini adalah orang yang tidak atau tidak terlibat dengan tragedi kemanusiaan atau pelanggaran HAM, korupsi, kejahatan lingkungan, dan sebagainya," kata Deputi Koordinator KontraS, Ferry Kusuma, di kantor KontraS, Senen, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Ferry mengatakan calon menteri yang bebas pelanggaran HAM menjadi bukti Jokowi mewujudkan janji-janji menuntaskan kasus HAM. Dia juga mengingatkan agar menteri yang terpilih nantinya juga bekerja sesuai tupoksi dan tidak melanggar peraturan.

"Ini indikator penting bagi Pak Jokowi untuk menguji janji-janji atau komitmen politik yang disampaikan tadi, yang dilakukan menteri, tentu mereka harus bekerja sesuai den-

gan Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja, tapi tidak hanya kerja saja, ini harus sesuai dengan tupoksi masing-masing dan tidak melanggar aturan yang ada," ujar Ferry.

Ferry juga menekankan posisi menteri strategis, seperti Menko Polhukam, tidak bisa diisi orang yang diduga terlibat pelanggaran HAM. Sebab, sebutnya, itu akan berpengaruh pada penyelesaian pelanggaran HAM.

"Kemenko Polhukam jabatan strategis dan penting, Menko Polhukam membawahi 12 lembaga negara yang berkaitan langsung dengan penanganan HAM, jangan sampai menteri-menteri yang duduk di sini itu juga menteri-menteri yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM. Karena akan makin menyulitkan penyelesaian HAM," ucap Ferry.

Presiden Jokowi, Senin (21/10) mulai memanggil para calon menteri ke Istana Kepresidenan. Tokoh yang sudah memenuhi panggilan Jokowi di antaranya Mahfud Md, Erick Thohir, Airlangga Hartarto, Nadiem Makarim, Pratikno dan Wishnutama. • osm



LAPORAN KONTRAS TENTANG KINERJA PEMERINTAHAN JOKOWI DAN JK

Kepala Divisi Pemantauan dan Impunitas Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Dimas Bagus Arya (kedua kanan), Kabiro Riset dan Dokumentasi Rivanlee Anandar (kiri), Deputi Koordinator Feri Kusuma (kedua kiri), dan Biro Penelitian Pemantauan dan Dokumentasi Danu Pratama Aulia (kanan) menyampaikan catatan pekerjaan rumah yang tidak selesai dalam sektor hak asasi manusia pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode tahun 2014-2019 di Jakarta, Senin (21/10).

GED
COURIER & LOGISTICS

**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TRIMUDA NUANSA CITRA Tbk ("Perseroan")**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 13 November 2019
Waktu : Pukul 10.00 - selesai
Tempat : Gedung Menara Hijau, Balairung Kiani 3
Jl. Letjen M.T. Haryono No.Kav.33, RT.3/RW.2, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan 12770

Mata acara Rapat:

1. Persetujuan peningkatan modal dasar Perseroan;
2. Persetujuan atas rencana Perseroan melakukan Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) sebanyak-banyaknya 800.000.000 saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 100,- per saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.4/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
3. Persetujuan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka PUT I;
4. Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
5. Penyesuaian penyebutan bidang usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia; dan
6. Persetujuan atas Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.2 sehubungan dengan rencana PUT I untuk pembelian saham perusahaan asuransi.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham dan Iklan Panggilan ini dianggap sebagai undangan resmi;
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat tersebut di atas adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan, PT Sharestar Indonesia pada tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB;
3. a. Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh Kuasanya dalam Rapat dengan membawa surat kuasa yang sah seperti yang ditentukan oleh Direksi. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan dilarang bertindak sebagai kuasa dari Pemegang Saham;
b. Formulir surat kuasa dapat diperoleh pada setiap hari kerja sejak tanggal iklan panggilan ini pada kantor BAE Perseroan di: PT Sharestar Indonesia
Gedung Berita Satu Plaza Lantai 7
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 Jakarta, 12950
4. a. Pemegang Saham atau Kuasanya yang menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor yang masih berlaku baik dari pemberi kuasa maupun penerima kuasa;
b. Pemegang Saham berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi anggaran dasar dan perubahannya terakhir serta akta pengangkatan direksi dan komisaris terakhir kepada Perseroan, 2 (dua) hari kerja sebelum Rapat diadakan;
c. Pemegang Saham dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui Badan Kustodian / Perusahaan Efek pada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) dan menyerahkan kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat;
5. Bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen elektronik telah tersedia di situs Perseroan sejak tanggal pengumuman sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat berupa salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham;
6. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Oktober 2019
Direksi

Akan Ada Penyesuaian Komisi di DPR Jika Nomenklatur Kementerian Berubah

JAKARTA (IM) - Pimpinan DPR bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (21/10) sore dan membahas perubahan nomenklatur kabinet yang baru. Ketua DPR Puan Maharani menyebut akan ada penyesuaian komisi-komisi di DPR jika ada nomenklatur baru di kabinet.

"Nantinya tentu saja akan ada perubahan komisi kalau memang sesuai dengan nomenklatur yang akan disebutkan oleh Presiden. Dan tentu saja efek dari perubahan tersebut nanti akan ada reorganisasi dan realokasi anggaran yang akan dibahas di komisi-komisi," kata Puan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/10).

Puan mengatakan komisi-komisi di DPR berjumlah 11. Adanya perubahan nomenklatur ini, kata Puan, tidak akan mengubah jadwal rapat paripurna DPR yang akan digelar besok dengan agenda penetapan alat kelengkapan dewan (AKD).

"Paripurna tetap saja. Karena memang ini sebetulnya kalau memang betul

Presiden menyampaikan akan ada perubahan nomenklatur yang dikonsultasikan kepada pimpinan DPR, ya rapat paripurna besok (hari ini, red) yang terkait sudah menjadi agenda penetapan AKD dan lain-lain itu akan tetap dilakukan. Kalau memang pun itu akan menjadi tambahan dalam rapat, agenda rapat paripurna ya itu akan menjadi tambahan," lanjut dia.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengundang pimpinan DPR ke Istana untuk membahas perubahan nomenklatur kabinet yang baru. Pimpinan DPR yang hadir bertemu dengan Jokowi adalah sang Ketua, Puan Maharani, serta 4 Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmat Gobel, Azis Syamsuddin, dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perubahan nomenklatur Kabinet Jokowi masih sesuai dengan jalur. Ada dua yang mengalami perubahan nomenklatur, tapi belum diketahui apa saja yang berubah. "Masih on the track. (Yang berubah) katanya 2," jelas Dasco. • han